

INTERVENSI MILITER KOALISI TELUK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI YAMAN

Cut Whuny Atmaidha¹
Nim. 1102045094

Abstract

The Gulf Countries' involvement in the Yemen conflict either in the form of military, economic, and international diplomacy to make the authors of this theme as research. The result of this research found that the basis of The Gulf's supports for Mansour Hadi's government is to maintain the stability of Middle Eastern security from the threat of widespread revolt. Operation Decisive Storm has the potential to affect the balance of power in the region for many years to come and shift many traditional political and military parameters in the Arab World and the larger Middle East. The success or failure of the operation is contingent on its ability to achieve its objectives and replicate its actions in the countries that suffer from experiences similar to that of Yemen.

Keywords: *Military Intervention, Yemen, Gulf countries.*

Pendahuluan

Yaman atau yang secara resmi dikenal dengan Republik Yaman adalah negara terbesar kedua di Jazirah Arab, Timur Tengah. Yaman merupakan satu-satunya negara berbentuk republik yang terletak di bagian Asia Barat Daya dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan Oman. Sebelum terbentuk menjadi satu-kesatuan, Yaman terpisah menjadi dua negara yaitu Yaman Utara yang berdiri pada tahun 1970 dan Yaman Selatan di tahun 1967. Akan tetapi karena adanya persamaan kedua negara yang lebih dominan, pada tahun 1990 antara pemerintah Yaman Utara dan Yaman Selatan sepakat untuk bersatu sehingga terbentuk pemerintahan yang baru yaitu Republik Yaman dan dipimpin oleh Ali Abdullah Shaleh.

Namun, pada tahun 1994, di wilayah Utara, tepatnya Provinsi Sa'adah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Al-Houthi dan menjadi awal kemunculan kelompok militan tersebut. Al-Houthi berasal dari kelompok masyarakat yang bermadzhab Syiah Zaidiyah dan merupakan kaum minoritas di Yaman. Awal pemberontakan Al-Houthi disebabkan oleh ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahan Ali Abdullah Shaleh yang mendukung Amerika Serikat dalam usaha memberantas terorisme yang tidak sesuai dengan ideologi Syi'ah Al-Houthi. Selain itu, adanya kejenuhan atas kekuasaan presiden Ali Abdullah Shaleh yang telah menjabat selama 33 tahun dianggap terlalu lama dan tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: cuma_isenk@yahoo.com

Pada fenomena gelombang *Arab Spring* yang terjadi di Jazirah Arab tahun 2011, dimanfaatkan oleh puluhan ribu masyarakat Yaman sebagai momentum untuk melakukan demonstrasi serupa menuntut reformasi kepemimpinan, tepatnya di pusat pemerintahan Yaman, Sana'a. Pemberontakan tersebut berakibat turunnya Ali Abdullah dari jabatannya pada bulan November 2011. Turunnya Ali Abdullah Shaleh digantikan oleh wakilnya, yakni Abd Raboo Manshour Hadi yang resmi menjabat sebagai Presiden Yaman melalui pemilu pada Februari 2012. Namun, pergantian kepemimpinan tersebut tidak serta merta membawa perbaikan signifikan bagi Yaman sebab tidak semua pihak bersikap kooperatif dengan penerus Ali Abdullah Shaleh.

Momentum kebangkitan kelompok Al-Houthi terjadi bulan Agustus 2014. Al-Houthi mengajukan beberapa tuntutan pada pemerintah dan mengancam akan menggulingkan presiden jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Salah satunya, mereka menuntut lebih banyak pembagian kekuasaan dalam badan pemerintahan. Tujuan yang paling utama dari pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Houthi adalah untuk mengambil alih pemerintahan dan kemudian menjalankan ideologi mereka. Sepanjang September 2014, pasukan pemberontak Al-Houthi menyerbu dan melontarkan serangan mortir di Sana'a, bahkan gedung pertelevisian milik pemerintah Yaman pun menjadi sasaran Al-Houthi. Puncak pemberontakan yang dilakukan Al-Houthi ditandai dengan keberhasilan mereka menyerang istana kepresidenan pada 19 Januari 2015 dan pengempungan rumah Manshour Hadi.

Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah Yaman untuk menghentikan pergerakan dan menghilangkan pengaruh kelompok Al-Houthi, Hadi mencabut pengunduran dirinya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Abd Raboo Manshour Hadi yakni meminta bantuan kepada Arab Saudi beserta koalisinya. Sebagai respon atas permintaan Hadi, tepatnya 26 Maret 2015, Arab Saudi beserta aliansi yang tergabung dalam Koalisi Teluk melancarkan intervensi berupa serangan udara dengan sasaran utama yakni pasukan pemberontak Al-Houthi.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu proses penyelesaian masalah dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengontrol konflik. Konsep *conflict resolution* atau resolusi konflik lahir atas dasar bagaimana manusia sebagai makhluk yang hidup secara sosial memiliki tuntutan untuk dapat saling menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Resolusi konflik mengandung tiga prinsip penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasa dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Sikap ini sangat penting karena tanpa pengakuan tersebut, mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi social, ekonomi dan politik yang didambakan.

Menurut John Galtung, ada tiga proses yang harus dilalui sebelum perdamaian dapat dibangun melalui pihak ketiga. Ketiga proses tersebut adalah *peace-making*, *peace-keeping*, *peace-building*. (John Galtung, 2007:93). *Peace-making* adalah suatu upaya guna memisahkan kekuatan-kekuatan dan kelompok bersenjata yang sedang berperang yang seringkali diasosiasikan dengan tugas-tugas sipil seperti memonitor, mengawasi kesepakatan damai serta mendukung intervensi kemanusiaan. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian netral. *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peace-building*, diharapkan *negative peace* (absennya kekerasan) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat tidak akan lagi mendapat kekerasan dalam jangka panjang dan merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif .

Konsep Military Intervention

Berdasarkan *Diplomat's Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer. (Boer Mauna, 2005:248) Sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi merupakan suatu tindakan ikut campur yang dilakukan negara ke negara lain melalui cara-cara yang dapat bersifat militer tanpa izin negara yang bersangkutan dengan maksud menyelesaikan suatu masalah.

Konsep intervensi militer merupakan jenis tertentu dari konsep intervensi yang menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen kebijakan luar negerinya, tetapi juga secara khusus menaruh perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari diberlakukannya kebijakan luar negeri tersebut. Berdasarkan hal tersebut, intervensi militer merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh *state or non-state actors* untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam kondisi tertentu, bagaimanapun juga antara intervensi militer dengan penggunaan kekuatan (pasukan militer) yang lainnya itu berbeda. Misalnya, intervensi militer membutuhkan asimetri kekuasaan antara aktor yang mengintervensi dan negara yang menjadi sasaran intervensi. Dalam intervensi militer, unsur terpenting yang dimiliki oleh suatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan intervensi ialah adanya *power*.

Holsti menyebutkan intervensi militer sebagai salah satu bentuk intervensi yang bercirikan pasukan dalam jumlah besar untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Intervensi militer tidak selalu disamakan dengan atau mengakibatkan perang, namun resiko itu selalu ada karena apabila pihak yang diintervensi militer melakukan perlawanan atau terjadi intervensi lain dari pihak ketiga maka intervensi militer dapat dianggap sebagai tindakan perang.

Teori Regional Security Complex

Teori *Regional Security Complex* merupakan teori yang menekankan fokusnya pada signifikan unsur regional kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional, yaitu melalui pembentukan *Regional Security Complexes*. *Security complex* tersebut didefinisikan oleh Buzan sebagai sekumpulan negara yang satu dan

yang lain memiliki kedekatan, yang kemudian membuat *primary security* negara-negara tersebut tergabung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (Barry Buzan, 1991:190) Definisi region atau kawasan dalam Teori *Regional Security Complex* lebih dilihat dari sisi keamanan hingga suatu wilayah dapat didefinisikan berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap sebuah isu keamanan. Region dalam konsep ini bukanlah mengacu pada sebuah pengertian region secara teritori saja, akan tetapi lebih kepada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, desekuritisasi, atau bahkan keduanya sekaligus, yang memiliki interaksi satu sama lain. Dan kemudian menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain. (Barry Buzan dan Ole Waever, 2003:44)

Analisa mengenai *Regional Security Complex* (RSC) ini meliputi unsur-unsur seperti geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Ketiga faktor ini nantinya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sistem politik, yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya saling ketergantungan antar negara satu dengan negara lain. Dan akan bermuara pada munculnya sistem pertahanan keamanan regional. Unsur yang terpenting dalam pembentukan RSC ini, menurut Barry Buzan, adalah adanya saling interdependensi dan interaksi dalam kerjasama keamanan antar negara-negara di dalam kawasan tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Buzan tersebut menggambarkan sebuah situasi bahwa ancaman yang ada dapat semakin mudah menyebar, baik pada jarak dekat maupun pada jarak yang jauh. Oleh karena itu, terjadilah suatu interdependensi keamanan dalam suatu kawasan, sehingga menjadikan keamanan tersebut menjadi semakin kompleks. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya hubungan antar aktor yang terlibat, baik secara langsung didalam kompleksitas tersebut ataupun aktor yang terlibat di luar kompleksitas keamanan yang sudah ada.

Metodologi Penelitian

Untuk menjelaskan alasan Koalisi Teluk melakukan intervensi militer dalam konflik internal yang terjadi di Yaman, penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku pustaka, *file* yang diunduh dari internet berupa informasi beserta dokumentasi resmi yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan untuk menjabarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur. Data yang telah dianalisis kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan.

Hasil Penelitian

Konflik Pemerintah Yaman dan Al-Houthi

Kelompok Al-Houthi muncul pada tahun 1994 dan bermarkas di provinsi Sa'adah, Yaman Utara. Kelompok ini semula bernama Ash-Shabab Al-Mukminin (Para Pemuda Beriman) yang bertujuan melawan kelompok yang beraliran Wahabi di Yaman. Pasca hancurnya gedung World Trade Center pada 11 September 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa 9/11, Ali Abdullah Shaleh mengumumkan dukungannya melawan terorisme sebagai dukungan pada Program Washington, *War On Terrorism*. Terjalinnnya hubungan baik antara Yaman dengan Amerika Serikat,

tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat Yaman dan menimbulkan penentangan dari kalangan pengikut Al-Houthi.

Lambat laun, aksi demonstrasi dan provokasi semakin gencar dilakukan oleh Al-Houthi dan berhasil memikat massa dalam jumlah besar. Pada masa pemerintahan Ali Abdullah Shaleh, Al-Houthi dan militer Yaman mengalami enam tahapan perang yang dimulai sejak Juni 2004 hingga Maret 2010. Memasuki tahun 2011 Fenomena gelombang *Arab Spring* yang terjadi di Jazirah Arab juga dimanfaatkan oleh puluhan ribu masyarakat Yaman untuk melakukan demonstrasi serupa yakni menuntut reformasi kepemimpinan. Para demonstran menjadikan isu kesenjangan sosial dan monopoli pemerintahan sebagai sasaran protes utamanya. Hal tersebut juga sebagai dampak dari kejenuhan masyarakat Yaman atas kepemimpinan Shaleh selama 33 tahun tidak dapat menyejahterakan rakyatnya. Aksi tuntutan dari masyarakat Yaman itu menginginkan Presiden Ali Abdullah Shaleh yang dianggap terlalu lama menjabat untuk segera turun dari jabatannya. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2012 Abd Raboo Manshour Hadi resmi menjadi Presiden Yaman setelah memenangkan pemilu yang diadakan pada 21 Februari 2012.

Pasca pergantian kepemimpinan, kekerasan yang dilakukan Al-Houthi di Yaman masih banyak terjadi. Pertempuran pertama antara Al-Houthi dengan rezim Manshour Hadi terjadi pada 18 Agustus 2014. Ketika itu pimpinan Al Houthi, Abdulmalik Al Houthi yang didukung ribuan demonstran mengancam akan menggulingkan presiden jika tuntutan atas pembagian kekuasaan bagi Al-Houthi dalam badan pemerintahan tidak dikabulkan. Masifnya gerakan Al-Houthi yang semula bermarkas di Saada, telah berhasil memperluas zona kekuatannya hingga ke pusat pemerintahan Yaman di Sana'a dan menyebar hingga ke kota lainnya.

Puncak pemberontakan yang dilakukan Al-Houthi ditandai dengan keberhasilan mereka menyerang istana kepresidenan pada 19 Januari 2015 dan pengepungan rumah Manshour Hadi. Situasi yang semakin kacau di pusat pemerintahan akhirnya mendorong Abd Raboo Manshour Hadi untuk menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Yaman.

Dampak Konflik Terhadap Situasi di Yaman dan Kawasan Timur Tengah

Konflik antara pemerintah Yaman dengan kelompok Al-Houthi yang telah berlangsung lama tidak hanya menyebabkan kerugian besar dari sisi pemerintah dan kelompok Al-Houthi sendiri, tetapi juga berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sipil. Pada bidang sosial, di tahun 2015, konflik di Yaman telah menghasilkan 267.173 pencari suaka dan 2.532.032 pengungsi internal (IDP). Permasalahan sosial yang menjadi dampak akibat meningkatnya intensitas konflik di Yaman lainnya yaitu peningkatan angka pengangguran.

Pada bidang ekonomi, konflik yang terjadi secara terus-menerus di Yaman membuat perekonomian di negara itu kian lumpuh. Kondisi penurunan dalam sektor ekonomi disebabkan oleh situasi keamanan yang memburuk sebagai akibat dari blokade darat, udara dan laut. Cadangan minyak yang mengalami penurunan akibat serangan yang sering terjadi pada infrastruktur nasional menjadi penyebab kemerosotan dalam kebutuhan cadangan minyak Yaman. Di samping dampak yang terjadi dalam negeri

Yaman sendiri, konflik Yaman juga mengancam kondisi perekonomian kawasan Timur Tengah khususnya dalam produksi dan harga minyak dunia. Hal itu disebabkan oleh posisinya yang berada di sebelah eksportir minyak utama di kawasan tersebut, yakni Arab Saudi dan juga Yaman menguasai Teluk Aden, sebagai jalur perminyakan tersibuk keempat di dunia. Karena posisi Yaman yang strategis tersebut, setelah runtuhnya Yaman dapat memiliki dampak signifikan pada produksi energi regional.

Hubungan Yaman dengan Negara-negara Teluk

Dewan Kerjasama Teluk atau *Gulf Cooperation Council (GCC)* didirikan dalam perjanjian yang disepakati antara Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) pada 25 Mei 1981 di Riyadh, Arab Saudi. Negara-negara ini menyatakan bahwa GCC dibentuk berdasarkan hubungan-hubungan khusus di antara mereka, sistem politik yang berlandaskan keyakinan Islam, kesamaan nasib, dan tujuan bersama. GCC bertujuan membentuk pasar bersama dalam tingkat regional dengan dewan perencanaan pertahanan juga.

Semenjak terbentuknya GCC di tahun 1981, telah ada wacana untuk mencalonkan Yaman dalam keanggotaan GCC. Akan tetapi hingga 1990, negara itu telah dibagi menjadi dua republik independen, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Sehubungan dengan sistem monarki di Teluk Arab, pemerintahan Marxis di Aden, ibu kota Yaman Selatan pada waktu itu dianggap sebagai ancaman. Pada dasarnya, Yaman telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan GCC sejak tahun 1996. Namun, masalah perbatasan yang belum terselesaikan dengan Arab Saudi dan Oman, dikombinasikan dengan kebencian yang timbul dari Perang Teluk-1 awalnya turut menghambat prospek permohonan Sana'a. Untuk meredakan hubungan antara Sana'a dan Riyadh, Yaman diizinkan untuk bergabung dengan Biro Pendidikan GCC, Dewan Menteri Kesehatan, Dewan Menteri Tenaga Kerja dan Sosial, dan turnamen Piala Teluk.

Di sisi lain, Arab Saudi sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Yaman telah memperjuangkan Yaman untuk bergabung dalam keanggotaan GCC, akan tetapi keinginan tersebut tidak sejalan dengan negara anggota GCC lainnya. Hal tersebut tidak berarti bahwa kelima negara lainnya tidak peduli dengan masa depan Yaman, sebaliknya, keragu-raguan untuk menerima Yaman dalam keanggotaan GCC menjadi patokan dalam pengambilan keputusan bersama. rencana konkret untuk mengintegrasikan Yaman ke dalam GCC tidak pernah terwujud, dikarenakan tidak adanya kriteria yang disepakati untuk mengintegrasikan anggota baru, lemahnya kapasitas Sekretariat GCC dan keraguan tentang keanggotaan Yaman.

Berdasarkan pengamatan GCC tentang Yaman secara historis, Yaman benar-benar tidak siap untuk masuk dalam keanggotaan GCC disebabkan struktur politik dan ekonominya yang tidak seimbang dan kian melemah semenjak peristiwa kudeta politik tahun 2011. Namun demikian, berdasarkan hubungan masing-masing negara anggota GCC dengan Yaman mengindikasikan bahwa meskipun Yaman tidak bergabung dalam keanggotaan GCC secara struktural, akan tetapi kehadiran Yaman menjadi tanggung jawab bersama dan prioritas bagi GCC.

Intervensi Militer Negara-negara Teluk

Operasi udara oleh Koalisi Teluk yang dipimpin Saudi untuk melawan kelompok Al-Houthi dimulai setelah presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi pada 24 Maret 2015 meminta dilakukannya intervensi militer dengan berlandaskan pada prinsip pembelaan diri dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga Piagam Liga Arab dan Perjanjian Pertahanan Bangsa Arab. Pada tanggal 26 Maret, angkatan udara Arab Saudi, Uni emirat Arab, Yordania, Kuwait Bahrain dan Qatar meluncurkan *Operation Decisive Storm*. Sejak saat itu, sekitar 170 pesawat tempur telah berpartisipasi penuh dalam kampanye udara melawan Al-Houthi, yang terdiri dari 100 pesawat dari Arab Saudi (tipe pesawat F-15S dan Eurofighter typhoon), 30 pesawat dari UEA (tipe F-16 dan Mirage 2000s) dan beberapa pesawat F-16 dari Bahrain 15, Yordania (6) dan Maroko (6).

Ketika *Operation Decisive Storm* diluncurkan, salah satu tindakan pertama yang dilakukan Koalisi Teluk yang dipimpin Saudi adalah menutup wilayah udara Yaman dan menempatkan pelabuhan-pelabuhannya di bawah blokade angkatan laut untuk mencegah adanya penambahan militer Al-Houthi dari pendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh. Pada tanggal 14 April 2015, Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan internasional terhadap blokade tersebut dan meminta negara anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pasokan senjata langsung atau tidak langsung kepada pemberontak Al-Houthi. Tahap pertama operasi ini berlangsung selama dua puluh sembilan hari dan angkatan udara koalisi melakukan upaya perlawanan kepada Al-Houthi melalui target militer, politik dan infrastruktur yang terkait dengan strategi perang secara keseluruhan.

Upaya lain yang dilakukan koalisi untuk mengisolasi daerah yang dikuasai Al-Houthi yakni dengan menonaktifkan bandara dan pelabuhan Laut Merah. Sedangkan serangan lainnya difokuskan pada pasukan Al-Houthi dan basis pertahanannya di wilayah utara Yaman, kampanye udara di perbatasan Saudi-Yaman dan kamp militer serta gudang senjata milik Al-Houthi. Pada tanggal 22 April, juru bicara koalisi Brigadir Jenderal Ahmed Asiri mengumumkan berakhirnya *Operation Decisive Storm* (Operasi Badai Penghancur) dan menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan tujuannya di Yaman dengan menghancurkan rudal balistik Al-Houthi dan unit militer yang menjadi sekutu Al-Houthi.

Menjaga Keamanan dan Stabilitas Kawasan Timur Tengah Dari Ancaman Jaringan Terorisme Global

Dari segi keamanan regional, yang dihadapi oleh negara-negara Teluk pasca meningkatnya intensitas perang sipil pemerintah Yaman dengan Al-Houthi adalah menyebarnya ancaman terorisme yang berasal dari Al-Qaeda atau AQAP (Al-Qaeda in Arabian Peninsula) yang merupakan jaringan terorisme pada tingkat global. Ancaman keamanan juga diperparah dengan kemunculan IS (Islamic State) yang telah menguasai Iraq dan Suriah.

AQAP, seperti afiliasinya di Suriah, Jabhat al-Nusra, telah lama berusaha untuk membingkai gejolak regional melalui lensa sektarian sebagai bagian dari sebuah kampanye untuk merekrut suku Sunni yang tidak puas untuk tujuan ekstrimisnya. Kelompok-kelompok seperti AQAP dan IS telah mengarahkan pandangan mereka

pada GCC dikarenakan negara-negara yang prestisius dalam kawasan Teluk Arab tersebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat sehingga mereka dianggap sebagai negara “korup”, “sesat”, “murtad”, dan pos terdepan untuk “kolonialisme”. Terlebih lagi, pemerintah Yaman pada rezim Ali Abdullah Shaleh berafiliasi dengan Amerika Serikat dalam Program Washington, *War on Terrorism*.

Kekuatan AQAP yang berkembang di Yaman dapat menggema di seluruh jaringan Al-Qaeda dan meningkatkan pertarungan dalam persaingan antara Al-Qaeda dan IS untuk memimpin gerakan jihadis global. Hal ini terutama berlaku untuk Riyadh, yang telah melakukan kampanye domestik selama bertahun-tahun melawan Al-Qaeda, dan berusaha menghentikan warganya pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis. Lemahnya pemerintahan Yaman pasca serangan Al-Houthi tentunya dapat mengancam keamanan Arab Saudi sebagai pemimpin GCC dan juga intervensi yang dilakukan Koalisi Teluk. Di mana jika Saudi tidak segera melakukan penanganan, maka konflik di Yaman akan membawa pengaruh besar mengingat Saudi berbatasan langsung dengan Yaman secara geografis.

Salah satu faktor yang dapat menunjang pergerakan AQAP di Yaman yakni mereka memanfaatkan kacaunya situasi politik akibat konflik pemerintah Yaman dengan Al-Houthi. Krisis politik yang terus berlangsung di Yaman pada akhirnya digunakan AQAP untuk memperluas zona kekuasaannya. Gubernur baru Aden, Brigadir Jenderal Idruss al-Zubaidi, mengatakan bahwa pemerintahannya tidak memiliki kemampuan finansial dan kapasitas yang cukup dan menandingi kekuatan Al-Qaeda dan IS. Menurutnya, kelompok-kelompok ekstremis secara aktif merekrut anggota dan melatih orang-orang dalam jumlah besar setiap harinya. Gubernur al-Zubaidi menyebutkan perlunya mengadakan pelatihan yang ditargetkan dalam kontraterorisme dan dukungan untuk membangun kapasitas pasukan keamanan lokal dalam menghadapi kelompok militan.

AQAP telah menggunakan krisis untuk merebut dan mengontrol wilayah Yaman yang signifikan termasuk pelabuhan Mukallah, kota terbesar kelima di Yaman. Pada April 2015, pejuang AQAP di Mukallah menyerbu sebuah penjara selama serangan itu dan dilaporkan membebaskan sekitar 300 teroris yang dipenjara. Praktik membebaskan narapidana telah menjadi taktik reguler untuk AQAP sejak kekuatan Al-Houthi terkonsolidasi. Maraknya aktivitas AQAP di Timur Tengah hingga saat ini dikarenakan mereka menentang campur tangan dan intervensi asing dari negara-negara barat terutama peran Amerika Serikat di Timur Tengah karena perbedaan ideologi dan mengusung paham Islam garis keras. Keberadaan Al-Qaeda di Yaman tidak dapat dikucilkan, yakni menyangkut keamanan wilayah ini karena pengaruh yang berkembang menimbulkan ancaman terhadap keamanan internal hingga negara yang berada di sekitar Yaman, terutama Arab Saudi yang menjadi mitra Amerika Serikat dalam menghadapi AQAP.

Selain itu, Al-Qaeda di Yaman sedang membentuk kembali ke dalam jaringan regional, AQAP, dengan infrastruktur organisasi yang tahan lama yang dapat bertahan dari hilangnya komandan utama. Hal ini mencerminkan ambisi kelompok yang semakin meningkat dalam hal lingkup kegiatan mereka. Wilayah yang kurang diperintah di Yaman menjadi batu loncatan untuk serangan di internal Yaman, Semenanjung Arab, Tanduk Afrika dan bahkan di Amerika Serikat.

Gambar
Peta Wilayah Kekuatan AQAP di Yaman



Sumber : *Critical Threats*

Di sisi lain, selama krisis politik di Yaman, IS telah mengklaim sedikitnya 25 serangan di Yaman termasuk dua serangan bunuh diri yang menargetkan masjid di Sana'a. Akibat serangan IS tersebut, menewaskan 130 orang pada Maret 2015, bom mobil di wilayah pemerintahan Yaman yang menewaskan 22 orang tentara UEA dan tentara Yaman di Aden, dan bom mobil lain yang menewaskan mantan gubernur Aden beserta enam pengawalinya pada awal Desember. Kelompok ISIS di Yaman, menyebut dirinya "Wilayat Sana'a" dan bertujuan mempercepat konflik sektarian di Yaman dan berusaha menunjukkan kemampuannya bersaing dengan AQAP. Upaya ISIS untuk meminimalkan pengaruh AQAP di Yaman adalah bagian dari persaingan kelompok yang lebih luas untuk dominasi gerakan jihadis global.

Ekspansi Al-Houthi di Yaman telah mendorong banyak suku lokal di wilayah tengah dan selatan Yaman untuk bekerja dengan AQAP, terlebih dari kelompok masyarakat yang memiliki ideologi Sunni, dan kelompok ISIS mungkin terlihat meniru strategi yang sama. ISIS kemudian melakukan serangan-serangan massal yang menargetkan individu-individu yang berafiliasi dengan Al-Houthi dan masjid-masjid yang didominasi Syiah untuk memicu mobilisasi populer di Yaman sepanjang garis sektarian. Skenario seperti itu dapat mendorong Al-Houthis untuk menindak lanjuti oposisi Sunni dan memperluas bahkan lebih jauh ke timur Yaman, di mana oposisi suku terhadap Al-Houthis lebih kuat. Situasi ini pada akhirnya membuat Arab Saudi, yang juga terganggu akibat serangan ISIS, termotivasi untuk memperluas operasi militernya di Yaman jika Al-Houthi melakukan ekspansi ke Yaman Timur atau melakukan lebih banyak serangan ke perbatasan Arab Saudi dan Yaman.

Mengurangi Pengaruh Iran

Menurut Arab Saudi sebagai pimpinan Koalisi Teluk yang menyokong kubu pemerintahan Presiden Hadi, Al-Houthi adalah wakil Iran dalam konflik tersebut. Kedekatan ideologi antara Al-Houthi dengan Iran menjadi indikasi keterlibatan Iran sebagai penyokong kubu Al-Houthi. Pemerintah Yaman dan Koalisi Arab Saudi

menyatakan bahwasanya Iran terlibat dalam hal memberikan bantuan baik segi pendanaan, logistik maupun senjata perang pada pemberontakan Al-Houthi. Hal itu yang kemudian menjadikan Houthi tetap bertahan dalam perang dengan pemerintah Yaman selama kurun waktu yang cukup lama. Pasukan keamanan Yaman telah menyita sebuah kapal yang mengangkut senjata yang ditujukan untuk Al-Houthi di sebuah pelabuhan di provinsi Haja dan juga menemukan 6 unit senjata Al-Houthi di Amran yang mengandung rudal jarak pendek, dan senapan mesin yang terbuat dari Iran. Pada saat penyidangan di pengadilan pun beberapa pendukung Al-Houthi yang ditawan pemerintah telah mengakui mereka menggunakan senjata Iran. Selain itu, kantor berita Iran, *IRNA*, melaporkan bahwa roket *Zelzal-3* adalah roket peledak buatan Iran yang diketahui digunakan juga oleh Iran, Suriah, dan pasukan Hizbullah dari Libanon.

Beberapa pemimpin Iran juga telah menyatakan bahwa Sana'a, ibu kota Yaman, adalah modal negara di Teluk Arab keempat, setelah Iraq, Suriah, dan Lebanon, yang menjadi target kendali mereka dan menjadi pintu masuk untuk menaklukkan negara-negara Arab lainnya. Strategi Iran dalam perang sipil di Yaman tercermin dalam komentar pejabat senior Iran, seorang Penasihat Pemimpin Tertinggi di *Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)*, Mojtaba Zolnour yang mengatakan (di depan majelis ulama) bahwa kemenangan Al-Houthi di Yaman, merupakan pintu untuk menaklukkan Arab Saudi. Hal itu disebabkan karena Arab Saudi sebagai aktor utama di Timur Tengah dan pemimpin koalisi negara-negara teluk, berbagi perbatasan sepanjang 1.700 km dengan wilayah utara Yaman. Bahkan, Presiden Iran Hassan Rouhani, menggambarkan pengambil-alihan Sana'a oleh Houthi pada September 2014 sebagai suatu pencapaian dan kemenangan yang gemilang.

Menurut laporan Dewan Keamanan PBB, Iran mulai mengirimkan sejumlah kecil senjata kepada Al-Houthi pada tahun 2009. Dalam satu kasus, pada bulan April 2009, sebuah kapal Iran memindahkan peti-peti senjata ke kapal Yaman di perairan internasional. Di waktu lain, pada bulan Februari 2011, sebuah kapal nelayan Iran disita oleh otoritas Yaman dan ditemukan membawa 900 anti-tank buatan Iran dan roket anti-helikopter. Dalam artikel pada bulan Maret 2012, *The New York Times* mengutip pernyataan dari pejabat militer dan intelijen AS yang tidak disebutkan namanya, bahwa Pasukan Quds, sebuah kelompok elit dari IRGC milik Iran telah menyelundupkan sejumlah besar AK-47, granat berpeluncur roket, dan senjata lain untuk pemberontak Al-Houthi di Yaman. Pada Januari 2013, sebuah gudang senjata yang disita dari sebuah kapal di lepas pantai Yaman untuk memiliki tanda-tanda Iran. Penemuan gudang senjata tersebut termasuk rudal *surface-to-air*, peledak C-4, dan senjata lainnya yang semuanya ditujukan untuk Al-Houthi.

Pada konflik yang kembali memanas di bulan September 2014, dengan pengambilalihan Sana'a atas Al-Houthi rupanya memimpin Iran untuk meningkatkan dukungannya lebih lanjut. Sejak pertengahan 2014, pejabat intelijen AS yang mengakui peningkatan bantuan Iran ke Al-Houthi, bahwa unit dari IRGC milik Iran menempatkan pasukannya di Yaman untuk melatih dan melengkapi barisan pasukan Al-Houthi. Selain itu, pejuang Houthi dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Iran dan Lebanon untuk pelatihan militer dengan Hizbullah. Ada juga laporan tentang pola padatnya aktivitas pengiriman antara Iran dan Yaman sejak bulan-bulan pertama

2015. Sebuah artikel *Financial Times*, secara khusus melaporkan bahwa setidaknya 4 kapal kargo besar dengan kapasitas gabungan lebih dari 15.000 ton, membuat rute perjalanan sangat tidak biasa dan tidak diumumkan oleh pelabuhan antara Iran dan Yaman yang dikendalikan oleh Houthi.

Yaman merupakan mata rantai keamanan terlemah di Teluk dan target mudah bagi Teheran untuk memanipulasi dan menaklukkannya. Intervensi militer oleh Koalisi Teluk dilakukan sebagai bentuk antisipasi akan potensi runtuhnya kedaulatan Yaman, yang menjadikan negara tersebut mudah dikendalikan oleh Iran. Yaman dinilai sebagai sebuah posisi strategis dan jika dikuasai oleh Iran hal tersebut akan menjadikan Iran sebagai hegemon baru yang cukup kuat.

Iran telah memanipulasi hilangnya kedaulatan beberapa negara di Timur Tengah selama dekade terakhir yaitu yang terjadi di Lebanon, Irak, Suriah, dan sekarang Yaman. Setiap wilayah yang ditempuh Iran telah mengalami perang saudara dan kehancuran. Akan tetapi, koalisi pimpinan Arab Saudi memberikan kontra narasi untuk skenario Iran. Apabila Iran sama dengan perang saudara dan kehancuran, maka koalisi pimpinan Saudi berarti persatuan, pembangunan, kebangkitan ekonomi, dan kemakmuran.

Permintaan Presiden Abd Raboo Manshour Hadi Secara Resmi

Hal lain yang mendasari Koalisi Arab Saudi dalam melakukan intervensi dalam perang Yaman ini adalah adanya surat resmi yang dikirimkan oleh Presiden Yaman Mansour Hadi yang ditujukan kepada kepala-kepala negara Teluk. Secara khusus, Presiden Hadi meminta bantuan militer GCC dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak Syiah Houthi. Permintaan Presiden Hadi kepada GCC tersebut secara tidak langsung memberikan legitimasi untuk melakukan intervensi militer. Bersamaan dengan hal itu, Koalisi yang dipimpin Arab Saudi melihat bahwa intervensi bukanlah suatu pilihan, melainkan menjadi kebutuhan setelah semua upaya diplomatik gagal meyakinkan kaum Al-Houthi untuk mematuhi pemimpin Yaman dan adanya penolakan mereka untuk mempertimbangkan solusi damai terhadap krisis politik.

Dalam kerangka ini, GCC menanggapi permintaan Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi, yang pada 7 Maret 2015 meminta diadakannya konferensi dengan negara-negara anggota GCC di Riyadh, dan juga dihadiri oleh semua partai politik Yaman. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota GCC menerima surat resmi dari Presiden Yaman Abd Raboo Manshour Hadi yang berisi permohonan bantuan dan tindakan militer untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dinegaranya. Presiden Hadi mengungkapkan urgensi agar dilakukannya intervensi dikarenakan kacaunya situasi politik yang diakibatkan oleh Al-Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah vital di Yaman dan kekhawatiran akan penyebaran Al-Qaeda akibat kekosongan kepemimpinan. Menanggapi surat tersebut, GCC menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menyediakan semua sarana dan tindakan yang diperlukan termasuk intervensi militer untuk melindungi Yaman dan rakyatnya dari agresi milisi Houthi. Hal itu dilakukan sebagai tanggung jawab negara-negara anggota GCC atas persaudaraan dengan orang-orang Yaman.

Menurut GCC, tindakan pemberontakan Al-Houthi yang ditujukan untuk hegemoni di Yaman dan menjadikannya sebagai basis untuk menyebarkan pengaruh di wilayah tersebut, bukan hanya menimbulkan ancaman keamanan, stabilitas dan kedaulatan bagi Yaman sendiri, tetapi telah menjadi ancaman komprehensif terhadap keamanan kawasan dan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, GCC menambahkan bahwa serangan yang dilancarkan Al-Houthi juga mempengaruhi stabilitas keamanan Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan Yaman. Begitu juga dengan negara-negara anggota GCC lainnya yang menghadapi resiko ancaman keamanan terus menerus karena adanya penggunaan senjata berat dan rudal jarak jauh di luar kendali otoritas yang sah.

Kesimpulan

Intervensi militer yang dilakukan Koalisi Teluk sebagai upaya penyelesaian konflik di Yaman datang sebagai pertimbangan dari beberapa negara di Teluk Arab yang lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Secara historis, negara-negara Arab telah banyak mengandalkan perlindungan Barat dan solusi Barat untuk masalah domestik mereka. Pada kasus Yaman kali ini, GCC sebagai aktor regional di Timur Tengah menyatukan negara-negara Arab dalam barisan koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk menyelamatkan kawasan Timur Tengah dari ancaman konflik lebih meluas di masa depan. Intervensi militer tersebut dinamakan *Operation Decisive Storm*. Tujuan dari dilakukannya *Operation Decisive Storm* adalah untuk mengembalikan kedaulatan Presiden Abd Raboo Manshour Hadi sebagai pemimpin yang sah di Yaman. Adapun alasan Koalisi Teluk melakukan intervensi militer dalam konflik Yaman yakni menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah dari ancaman jaringan terorisme global, seperti AQAP dan IS, mengurangi pengaruh Iran di Yaman, dan adanya permintaan Presiden Abd Raboo Manshour Hadi Secara Resmi kepada anggota negara-negara Teluk.

Daftar Pustaka

- Azar, Edward E., and John W. Burton. *International Conflict Resolution: Theory and Practice*. Boulder, Co: Rienner, 1986.
- Boer, Mauna. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2*, Bandung, PT. Alumni, 2005.
- Buzan, Barry. *People, States, and Fear*, London: Harvester Wheatsheaf, 1991
- Caney, S., *Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on Non-Intervention*, dalam *International Political Science Review*, London, Sage Publication, 1997.
- Hermawan, Yulius *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.
- Holsti, K.J., *Politik Internasional II : Kerangka Untuk Analisis*, terj. oleh M. Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga, 1988.